

**ISLAM DAN DEMOKRASI
DALAM PANDANGAN MUHAMMAD 'ĀBID AL-JĀBIRĪ DAN
ABŪ AL-A'LĀ MAUDŪDĪ**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT –SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

KIFRALWI SUPARDA

NIM: 01360632

PEMBIMBING:

Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag
GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007/1428

ABSTRAK

Akhir-akhir ini hampir semua orang menuntut demokrasi. Demokrasi secara tidak langsung telah dianggap sebagai suatu keniscayaan. Semua ideologi dan sistem pemerintahan yang telah ada selama ini seakan-akan telah takluk oleh keberhasilan demokrasi.

Namun di balik keberhasilan demokrasi, ia masih menyimpan keraguan bagi beberapa kalangan, terutama umat Islam. Kecaman terhadap demokrasi sering mencuat di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Kesan yang bisa ditangkap adalah Islam tidak cocok dengan demokrasi. Tapi apa benar demikian?

Tak bisa ditampik bahwa Islam adalah agama yang Universal. Misi Islam melampaui batas-batas geografis dan budaya. Islam secara *inhern* mempunyai nilai sendiri mengenai segala sesuatu. Hal ini sekali lagi mengundang pertanyaan; apakah nilai-nilai Islam sejalan—untuk tidak dikatakan bertolak belakang—dengan nilai-nilai yang diusung demokrasi? Dalam rangka berusaha menemukan jawaban atas permasalahan ini, penulis mencoba memperbandingkan pendapat dua tokoh yang cukup berpengaruh dalam konstelasi pemikiran politik umat Islam dewasa ini. Mereka adalah Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī dari Maroko dan Abū al-A’lā Maudūdī dari anak benua India yang kini bernama Republik Islam Pakistan.

Selain berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang telah lama menggajal tersebut, penulis juga berusaha menemukan relevansi pemikiran kedua tokoh untuk konteks keindonesiaan sehingga karya ini bukan sekedar “melangit” saja tanpa ada fungsi dan sumbangan apa-apa bagi umat Islam Indonesia.

Dengan pendekatan historis dan politis yang digunakan, hasil penelitian ini adalah: al-Jābirī memandang demokrasi merupakan suatu keniscayaan bagi negeri Arab (dan umat Islam pada umumnya), karena demokrasi merupakan suatu hal yang terbuka untuk difikirkan (*qābil li at-Taḥkīr fih*). Islam bisa menerima demokrasi dengan catatan bahwa demokrasi yang hendak diterapkan haruslah dilahirkan dari pengalaman kesejarahan umat Islam (bangsa Arab pada khususnya, umat Islam pada umumnya) sendiri, bukan mengambil begitu saja dari bangsa lain. Lalu Maudūdī memandang bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam. konsep kedaulatan rakyat, yang merupakan inti demokrasi, dengan sangat jelas bertentangan dengan keyakinan Islam yang mengakui kedaulatan satu-satunya hanyalah milik Allah.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, ketika melihat konsep *syūrā* al-Jābirī dan Maudūdī sependapat bahwa *syūrā* hanyalah konsultasi yang tidak mengikat; “*Syūrā* lain, demokrasi lain”.

Untuk konteks keindonesiaan, pendapat al-Jābirī bahwa demokrasi sepatutnya digali dari pengalaman kesejarahan bangsa Arab (atau bangsa manapun yang hendak menerapkannya), mendapatkan konteksnya di Indonesia. Sedang pendapat Maudūdī bahwa demokrasi sangat rentan terhadap penyelewengan, memang bertemu prakteknya di Indonesia. Namun seperti kata al-Jābirī, “tidak ada alternatif lain bagi kediktatoran dan tirani, selain demokrasi,” otomatis demokrasi tetap relevan bagi Indonesia.

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Kifralwi Suparda

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kifralwi Suparda
N I M : 01360632
Judul : **Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Muhammad
'Ābid al-Jābirī dan Abū al-A'lā al-Maudūdi**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1428 H
20 Juni 2007 M

Pembimbing I



Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Kifralwi Suparda

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kifralwi Suparda
N I M : 01360632
Judul : **Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Muhammad
'Ābid al-Jābirī dan Abū al-A'lā al-Maudūdī**

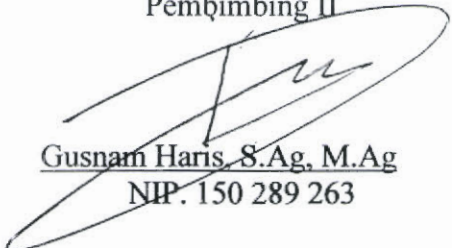
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1428 H
20 Juni 2007 M

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM PANDANGAN MUHAMMAD 'ĀBID
AL-JĀBIRĪ DAN ABŪ AL-A'LĀ MAUDŪDĪ**

Yang disusun oleh:

KIFRALWI SUPARDA

NIM: 01360632

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2007/ 18 Jumadil Akhir 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 18 Jumadil Akhir 1428 H
3 Juli 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 150 240 524

Pembimbing I

Drs. Ocktoberriyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Penguji I

Drs. Ocktoberriyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Sekretaris Sidang

Fathorrahman, S.Ag, M.Si.
NIP. 150 368 350

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 289 263

Penguji II

Budi/Ruhiatuddin, SH, M.Hum.
NIP. 150 300 640

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	Y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-------------	------	-------------	------

	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a-i
و	Fathah dan Wau	au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	ā	A dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رمي ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *asy-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

ومحمد الرسول ----- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

MOTTO

"Khairu an-nās anfa'u li an-nās"



PERSEMBAHAN

Apak, Amak, Abang dan Uni;
Baru ini yang bisa kupersembahkan buat kalian,
Semoga yang sedikit ini bisa berguna bagi semua:
Agama, Masyarakat, Bangsa dan Tanah Air Tercinta.
Juga kupersembahkan buat para sahabat, *dunsanak*
Tak lupa Almainater UIN Sunan Kalijaga
Terkhusus Fakultas Syari'ah
Perbandingan Mazhab
dan Hukum
dan aku
AL
W
I

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .
اما بعد .

Syukur dan puji kehadiran Allah sumber segala kuasa di alam semesta yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Shalawat beserta Salam tercurah tak henti-henti kepada junjungan umat Islam, Muhammad SAW.

Setelah melalui proses yang tidak bisa dikatakan sebentar dan dengan usaha yang tidak kenal kata menyerah, karya ini akhirnya bisa hadir di hadapan sidang pembaca semua. Sungguh penulis berterima kasih kepada banyak fihak yang tanpa mereka skripsi ini belum tentu bisa terwujud seperti yang ada di hadapan sidang pembaca semua. Walau tulisan ini masih jauh dari sempurna, tapi dengan kesederhanaannyalah inspirasi selalu datang menemani hari-hari penulis ketika berjibaku dengan kemalasan dan segala persoalan “hidup” yang tak pernah henti “memperkosa” otak penulis. Segala saran dan kritik dengan senang hati penulis tampung demi kebaikan tulisan ini. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Bapak Drs. Agus Moh Najib, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Drs. Ocktoberriyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Amak dan Apak yang kusayangi, kalianlah inspirasi dalam setiap langkah kakiku.
6. Abang dan Uni, yang tanpa bantuan kalian entah apa aku ini jadinya.
7. Segenap teman-teman seperjuangan, Agus, Edward, Hurri, Didi, Apik terimakasih telah menjadi temanku.
8. Zul Fadli yang telah merelakan fasilitas dan ketenangannya dipakai olehku, maaf dan terima kasih Fad, tanpa kerelaanmu semua ini tiada.
9. Segenap warga Surau Tuo, Jaringan Alumni MAN-PK Koto Baru Padang Panjang di Yogyakarta (JAMAYYKA), Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) UIN Sunan Kalijaga, beserta semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga jasa dan amal baik mereka menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang layak di Allah SWT.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1428 H
20 Juni 2007 M



Kifralwi Suparda



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II SEPUTAR DEMOKRASI	19
A. Demokrasi Secara Umum.....	19
B. Islam dan Demokrasi.....	25
C. Perkembangan Demokrasi di Maroko dan Pakistan	32
1. Maroko dan Demokrasi.....	32
2. Pakistan dan Demokrasi.....	43
BAB III AL-JĀBIRĪ DAN MAUDŪDĪ	50
A. Biografi Singkat al-Jābirī	50

B. Pandangan al-Jābirī tentang Demokrasi	57
C. Biografi Singkat Maudūdī	70
D. Pandangan Maudūdī tentang Demokrasi	79
BAB IV TELAAH SEDERHANA ATAS PEMIKIRAN AL-JĀBIRĪ DAN MAUDŪDĪ DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN	87
A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat al-Jābirī dan Maudūdī	88
1. Titik temu pemikiran	88
2. Kekhasan yang membedakan pemikiran al-Jābirī dan Maudūdī	91
B. Relevansi Pemikiran al-Jābirī dan Maudūdī dalam konteks keindonesiaan	96
C. Relasi Islam dan Demokrasi Versi al-Jābirī dan Maudūdī	103
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran dan Rekomendasi di Penghujung Tulisan	108
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA/SARJANA	III
BIODATA PENULIS	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini tuntutan demokratisasi di berbagai aspek kehidupan cukup *santer* terdengar. Hal tersebut tidak saja terjadi di negara-negara kawasan Eropa, Asia, Afrika, Amerika Latin atau berbagai negara bekas komunis (penganut paham Marxis) saja, tetapi hampir seluruh negara dunia *mengelu-elukan* demokrasi, tak terkecuali Indonesia dan beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim.¹ Bila diamati, justru di negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslimlah tuntutan demokrasi terasa lebih kuat.² Hanya saja, Islam mempunyai metode sendiri dalam pengambilan keputusan, yaitu *syūrā*.³ Hal ini tentu membuat banyak orang bertanya; apakah demokrasi sesuai dengan Islam? Atau dalam bentuk pertanyaan lain; kenapa harus demokrasi?⁴

¹ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, alih bahasa Tim IRE Yogyakarta (Yogyakarta: IRE Press, 2003), hlm. vii-xiv.

² *Ibid.* Lihat juga Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *ad-Dīmuqrāṭiyyah wa Huqūq al-Insān* (Beirut: Markaz al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1994), hlm. 17-22.

³ Dalam Islam, telah dikenal tradisi *syūrā* yang merupakan warisan “otentik” umat Islam dalam kesejarahannya. *Syūrā* telah ada semenjak masa Muhammad SAW, bahkan jauh sebelum itu menurut beberapa sumber. Lihat misalnya Rahman Yasin, *Gagasan Islam tentang Demokrasi* (Yogyakarta: AK Group, 2006), hlm. 87-88.

⁴ Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering dilontarkan oleh berbagai kalangan, baik mereka yang mempunyai latar belakang Islam atau bukan. Misalnya lihat buku Khaled Abou el Fadl, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, alih bahasa Gita Ayu Rahmani dan Ruslani (Yogyakarta: Ufuk Press, 2004), hlm 54. Dan lihat juga Jhon L Esposito dan Jhon O Volf, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, alih bahasa oleh Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 5.

Demokrasi, sebagaimana yang disebutkan oleh Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī,⁵ merupakan slogan yang paling laku di antara ”berbagai tuntutan rakyat” di negeri Arab.⁶ Bahkan Francis Fukuyama seorang akademisi, komentator politik, dan penasihat pemerintah AS, mengungkapkan:

Adalah benar bahwa konstitusi Islam merupakan sebuah ideologi yang sistematis dan koheren, seperti halnya liberalisme dan komunisme, dengan kodenya sendiri mengenai moralitas dan doktrin keadilan politik dan sosial. Seruan Islam secara potensial adalah universal, yang menjangkau semua manusia sebagai manusia, dan bukan hanya untuk anggota-anggota dari kelompok etnis atau bangsa tertentu. Dan Islam memang telah berhasil mengalahkan demokrasi liberal di sebagian besar dunia Islam, dengan menempatkan ancaman yang mengerikan terhadap praktik-praktik liberal bahkan di negara-negara dimana ia tidak memiliki kekuasaan politik secara langsung. Berakhirnya perang dingin di Eropa secara langsung diikuti oleh tantangan terhadap barat dari Irak, di mana Islam dianggap sebagai faktornya.

Walaupun kekuasaan yang ditunjukkan oleh Islam dalam *Revival*-nya pada saat ini, bagaimanapun, ia tetap menyisakan persoalan bahwa agama ini sebenarnya tidak memiliki seruan di luar wilayah yang secara kultural adalah Islam. Masa-masa penaklukan budaya Islam, agaknya telah berakhir: ia bisa memperoleh kembali para pengikutnya yang telah hilang, tetapi tidak memiliki gaung bagi anak-anak muda di Berlin, Tokyo, maupun Moscow. Dan sementara hampir satu milyar manusia adalah Islam secara kultural –seperlima dari populasi dunia— mereka tidak dapat menentang demokrasi liberal di wilayahnya sendiri pada tingkat ide. Sesungguhnya, dunia Islam akan tampak lebih mudah diserang oleh ide-ide liberal dalam jangka panjang daripada sebaliknya, karena liberalisme semacam ini telah menarik para pengikut muslim yang banyak dan kuat selama satu setengah abad yang lalu. Sebagian dari alasan untuk kondisi sekarang ini, *revival* fundamentalis adalah kekuatan dari ancaman yang berasal dari nilai-nilai barat terhadap masyarakat Islam tradisional.⁷

⁵ Untuk selanjutnya Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī ditulis al-Jābirī dalam penulisan skripsi ini

⁶ Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *ad-Dīmuqrāṭiyyah wa Huqūq al-Insān*, (Beirut: Markaz al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1994), hlm. 17. Edisi terjemahannya berjudul: *Syurā: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, alih bahasa Mujiburrahman, (Yogyakarta : LkiS, 2003).

⁷ Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, alih bahasa M.H. Amrullah (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 77-78.

Bila ditelusuri buku-buku yang berkaitan dengan topik demokrasi dan sistem pemerintahan yang ditulis pemikir muslim kontemporer, maka akan ditemukan begitu banyak kontroversi dan silang pendapat. Sebagian beranggapan bahwa antara Islam dan demokrasi tidak memiliki kaitan sama sekali, Islam tidak mengenal kata demokrasi.⁸ Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa demokrasi adalah bagian dari Islam. Demokrasi adalah suatu keharusan yang tidak boleh tidak, ia adalah syarat mutlak bagi kemajuan peradaban suatu bangsa.⁹ Adapun kelompok yang terakhir (yang ketiga), berpendapat bahwa antara Islam dan demokrasi terdapat pertautan sekaligus perbedaan.¹⁰

Mengutip dan meringkas dari buku Idris Thaha, ada tiga alasan penting mengapa pembahasan dan kontroversi seputar Islam dan demokrasi tidak akan ada habisnya;¹¹

Pertama: Sumber atau rujukan bahasan ini sangat banyak dan kaya. Ini merupakan hasil akumulasi pengalaman dunia muslim dalam membangun peradaban selama sekitar lima belas abad. Pengalaman historis ini menjadi

⁸ Lihat misalnya buku Taufiq asy-Syāwī, *Syurā Bukan Demokrasi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). Juga Muhammad Amān bin 'Alī al-Jāmī, *Syuro Murni Bukan Demokrasi*, alih bahasa Saiful Islam (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001). Selain itu masih banyak tokoh-tokoh lain dari berbagai negara yang berpendapat bahwa Islam dan demokrasi sama sekali berbeda dan tidak dapat dipadukan, seperti Syaikh Fadlallāh Nūri dari Iran, Syaikh Muhammad Mutawwalī asy-Sya'rawī dari Mesir dan lain-lain.

⁹ Tokoh yang berpendapat seperti ini antara lain M. Ali. Jinah dari India, KH Abdurrahman Wahid dan Deliar noer dari Indonesia dan masih banyak tokoh Islam lainnya yang cenderung sependapat dengan kelompok ini dan rata-rata mereka adalah tokoh-tokoh nasionalis.

¹⁰ Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, (Yogyakarta: Teraju, 2005) hlm 7-10.

¹¹ *Ibid*, hlm. 7.

modal penting dan sekaligus membuahkan banyak sumber bagi penulisan tentang Islam dan demokrasi.

Kedua: Kompleksitas permasalahan Islam dan demokrasi yang dibahas. Ini mendorong para pengkaji atau peneliti untuk membahas dengan menggunakan satu atau beberapa pintu pendekatan yang sangat spesifik. Sebab, bila menggunakan pendekatan yang menyeluruh, maka dituntut tidak hanya kemampuan menyeluruh pula tapi juga kesadaran untuk tidak terjebak pada reduksionisme atau kecenderungan penyederhanaan masalah yang sebenarnya sangat kompleks dan rumit.

Ketiga: Adanya pandangan ideologis berbagai kelompok muslim. Akibatnya pembahasan tentang Islam dan demokrasi akan terus berkepanjangan dan tak akan pernah berhenti.

Dari berbagai kontroversi dan silang pendapat yang ada, akan diteliti pemikiran dua tokoh yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran intelektual muslim, dua penulis berkaliber internasional. Yaitu Abū al-A'la Maudūdī¹² dari anak benua India (kemudian bernama Pakistan) dan Muhammad 'Ābid al-Jābirī dari Maroko. Kedua tokoh ini memiliki pemikiran yang khas tentang demokrasi, bahkan hingga sekarang pemikiran mereka sering dijadikan referensi dalam berbagai kajian dan seminar.

Al-Jābirī telah menulis sebuah buku yang membahas berbagai aspek demokrasi. Ia begitu gencar menyerukan keniscayaan demokrasi di negeri Arab demi mewujudkan persatuan di antara bangsa Arab yang telah terpecah

¹² Untuk selanjutnya Abū al-A'la Maudūdī ditulis Maudūdī saja.

belah. Dengan demokrasi, menurut al-Jābirī, segala hal kekurangan dan keterpecah-belahan di antara bangsa Arab yang telah menjadi masalah yang tak kunjung selesai selama ini, akan dapat diatasi. Menariknya pemikiran al-Jābirī, ia menyatakan bahwa tidak ada alternatif lain bagi kemajuan dan persatuan bangsa Arab kecuali dengan mulai menerapkan demokrasi secara konsekuen. Hal ini memang melahirkan tantangan yang sangat besar, “demokrasi bukanlah masalah yang gampang dan bukanlah suatu perpindahan dari tahapan ke tahapan lainnya, melainkan suatu kelahiran baru, dan sudah tentu, kelahiran yang susah payah...”.¹³

Lain al-Jābirī, lain pula Maudūdī. Tokoh ini awalnya merupakan seorang wartawan. Ia banyak menulis buku-buku dan ceramah mengenai politik Islam dan kenegaraan. Pandangannya tentang demokrasi sangat berpengaruh terhadap begitu banyak muslim dunia bahkan hingga saat ini. Salah satu konsep yang diutarakan oleh Maudūdī adalah “Theo democracy”.

M. Amien Rais dalam pengantar salah satu karya Maudūdī yang diterjemah ke bahasa Indonesia menyebutkan:

Pemikiran-pemikiran Maududi tidak saja berpengaruh dan bergema di kawasan sub-kontinen Indo-Pakistan, melainkan juga diseluruh dunia Islam, dari Indonesia sampai ke Turki. Karya-karyanya telah banyak diterjemahkan kedalam bahasa-bahasa Arab, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persi, Tamil, Bengali dan lain-lainnya, termasuk bahasa Indonesia. Tokoh internasional Islam Maududi juga pernah berkeliling dunia untuk memberikan kuliah-kuliah di-berbagai ibu kota Negara-negara Timur Tengah, di London, New York, Toronto dan sejumlah pusat studi di kota-kota besar dunia. Ia juga pernah melakukan “study tour” ke Jordan,

¹³ Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, *ad-Dīmuqrāṭiyyah*, hlm 28-29.

Jerusalem, Suriah, Mesir dan Saudi Arabia untuk mempelajari aspek-aspek geografis dan historis beberapa tempat yang disebutkan dalam Al-Quran.¹⁴

Maudūdī begitu gencar mengumandangkan penerapan syari'at Islam di Pakistan. Perjuangannya adalah untuk mewujudkan Pakistan sebagai negara yang berideologikan Islam. Ia selalu bersikap konsisten walau harus mendekam di penjara. Cita-citanya untuk menjadikan Pakistan sebagai negara Islam yang memberlakukan syariat Islam sebagai dasar hukum mendorongnya untuk mendalami Islam lebih jauh.

Maudūdī menulis dan mengonsepsikan bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan yang sesuai dan selaras dengan Islam baik dalam bentuk buku ataupun tulisan lepas di media massa. Tak sampai disitu saja, ia melakukan propaganda dan menghimpun suara (tuntutan rakyat) –yang saat itu juga sangat menginginkan penerapan syari'at Islam di Pakistan— lalu menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah. Tuntutan untuk segera memberlakukan Islam sebagai konstitusi negara tentu saja membuat Maudūdī harus berhadapan langsung dengan pemerintah secara *face to face*, padahal rezim yang berkuasa saat itu selalu berusaha mengelak atau mengulur-ulur waktu dengan dalih yang bermacam-macam yang intinya tidak ingin memberlakukan syariat Islam sebagai konstitusi. Akhirnya beliau dipenjarakan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu.

Selama dipenjarakan, Maudūdī tetap aktif menulis, terutama yang menyangkut politik dan hukum.¹⁵ Hal yang menarik dari Maudūdī adalah

¹⁴ Abu al-A'la Maudūdī, *Khilafah wa al mulk*, edisi terjemahan berjudul: *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa Muhammad Al-Baqir, cet. ke-6 (Bandung: Mizan, 1996), hlm.11.

keberaniannya untuk menelanjangi sistem demokrasi yang dipraktekkan di-negara-negara modern dengan argumentasi-argumentasi yang berpijak pada nafas syari'at Islam. Maudūdī sampai pada suatu konsep demokrasi yang ia sarikan sendiri atas pemahaman terhadap ajaran Islam. Ia mengkritisi demokrasi modern terutama konsep tentang “kedaulatan”. Menurutnyā, kedaulatan itu hanyalah milik Allah semata. Dari pemahaman tentang “kedaulatan” inilah cikal bakal munculnya “teo demokrasi” yang merupakan kekhasan pemikiran Maudūdī.

Hal yang lebih menarik lagi tentang Maudūdī adalah bahwa ada semacam kecenderungan di dunia Islam bahwa belum lengkap rasanya sebuah tulisan ataupun buku yang berbicara masalah agama dan negara atau agama dan politik tanpa menyinggung Maudūdī bersamanya, lebih-lebih bila tulisan tersebut berkaitan erat dengan bumi Pakistan dan sekitarnya.¹⁶

Mengingat dan menimbang begitu unik dan istimewanya pemikiran al-Jābirī dan Maudūdī tentang demokrasi, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa pengaruh dua orang tersebut sangat besar terhadap dunia pemikiran Islam, penulis lalu mencoba memperbandingkan pemikiran mereka berdua sebagai bahan kajian dalam skripsi ini.

¹⁵ Lihat dalam pengantar edisi revisi (dari edisi 2-6) Abu al-A'la Maudūdī, *The Islamic Law and Constitution*.

¹⁶ Sebagai contoh misalnya Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1990) buku ini telah diterjemah ke bahasa Indonesia dengan judul *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, cet ke-tiga (Yogyakarta: LkiS, 2001), terutama pada Bab III. Dan lihat juga Jhon L. Esposito dan Jhon O Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, alih bahasa oleh Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999). Begitu juga Munawir Siadzali, *Islam dan Tata Negara*, cet ke-5 (Jakarta: UI-Press, 1993). Dan masih banyak buku lainnya.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana persamaan dan perbedaan pendapat al-Jābirī dan Maudūdī mengenai konsep demokrasi dan bagaimana mereka melihat relasi Islam dan demokrasi.
2. Bagaimana relevansi pemikiran al-Jābirī dan Maudūdī tentang demokrasi dalam konteks keindonesiaan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat al-Jābirī dan Maudūdī mengenai demokrasi serta relasinya dengan Islam.
2. Untuk mengetahui sejauh mana persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tentang demokrasi.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran kedua tokoh tentang demokrasi

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengamatan penulis belum ada kajian yang memperbandingkan pendapat kedua tokoh tersebut di atas tentang demokrasi. Yang ada hanyalah tulisan berupa skripsi yang memperbandingkan pendapat al-Jābirī dan M. Natsir tentang demokrasi, skripsi ini ditulis oleh Asep Zaelani MN dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, dengan judul "Demokrasi Dalam Islam: Studi Komparatif Antara M. Natsir dan Muhammad 'Ābid al-Jābirī."¹⁷ Skripsi ini lebih memfokuskan kajian pada perbandingan secara kualitatif antara dua orang yang sama-sama mendukung penerapan demokrasi untuk negerinya. Selain itu, pendekatan sosio historis yang dilakukan belum cukup mampu menguak essensi signifikan dari pemikiran kedua tokoh, terutama al-Jābirī. Setentang al-Jābirī, yang banyak dieksplorasi justru "kritik nalar Arab"-nya, padahal skripsi ini seharusnya lebih *konsen* pada konsep demokrasi. Di samping itu, ada lagi sebuah skripsi yang membahas teodemokrasi Maudūdī oleh Siti Nurhayati Isnaini, juga dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dengan judul "Pemikiran Abul 'A'la Maudūdī tentang Teo Demokrasi (Studi Terhadap Relevansinya dengan Pemikiran Kenegaraan Indonesia)".¹⁸ Skripsi ini bukanlah studi perbandingan melainkan eksplorasi pandangan Maudūdī dengan menggunakan metode deskriptif. Relevansi yang ditemukan untuk konteks keindonesiaan-pun belum terlalu *mengena*. Lainnya

¹⁷ Asep Zaelani.MN, "Demokrasi Dalam Islam: Studi Komparatif Antara M. Natsir dan Muhammad 'Ābid al-Jābirī," skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹⁸ Siti Nurhayati Isnaini, "Pemikiran Abul 'A'la Maudūdī tentang Teo Demokrasi: Studi Terhadap Relevansinya dengan Pemikiran Kenegaraan Indonesia," skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

adalah skripsi saudara Muhammad Abduh, "Format Ideal Demokrasi Di dunia Arab (Tela'ah atas Pemikiran Politik al-Jābirī)".¹⁹ Skripsi ini lebih menitik beratkan penelitian pada bentuk ideal demokrasi bagi negeri Arab dan bukan studi perbandingan. Relevansinya juga terbatas pada negeri Arab saja. Lalu skripsi Muhammad Anas dengan judul "Kritik Ilmu Pengetahuan Jurgen Habermas dan Abed al-Jābirī (Studi Komparasi Epistemologi)".²⁰ Sangat jelas skripsi ini jauh berbeda dengan penelitian penulis. Kemudian skripsi yang di tulis Zayyin Alfi Jihad "Intuisi Menurut Muhammad Abed al-Jābirī".²¹ Beda tema dan beda masalah dengan penelitian penulis. "Kritik Epistemologi Nalar Arab Menurut Abed al-Jābirī" yang di tulis oleh Zulfikar,²² fokusnya adalah proyek "kritik nalar Arab" al-Jābirī. Seterusnya skripsi Najib Kailani "Pemikiran Politik Islam al-Jābirī".²³ Skripsi ini berusaha mengeksplorasi pemikiran politik Islam al-Jābirī. Sangat sedikit pembicaraan seputar demokrasi dan kemungkinan aplikasinya bagi negeri Arab yang justru hal ini adalah poin penting pemikiran al-Jābirī dalam masalah politik Islam sekaligus adalah hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian Najib Kailani selain faktor perbandingan yang penulis lakukan. Lalu ada skripsi

¹⁹ Muhammad Abduh, "Format Ideal Demokrasi di dunia Arab (Tela'ah atas Pemikiran Politik al-Jābirī)," Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

²⁰ Muhammad Anas, "Kritik Ilmu Pengetahuan Jurgen Habermas dan Abed al-Jābirī (Studi Komparasi Epistemologi)," Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

²¹ Zayyin Alfi Jihad, "Intuisi Menurut Muhammad Abed al-Jābirī," Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

²² Zulfikar, "Kritik Epistemologi Nalar Arab Menurut Abed al-Jābirī," Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001).

²³ Najib Kailani, "Pemikiran Politik Islam al-Jābirī," Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

saudara Suardi dengan judul “Jilbab dalam pandangan Abul A’la al-Maududi dan Muhammad Sa’id al-Asymawi.” Skripsi ini merupakan studi perbandingan tentang masalah jilbab dan *hijāb*.²⁴

Selain Skripsi, ada disertasi Yudian Wahyudi yang berjudul “*The Slogan “Back to the Qur’ān and the Sunna”: A Comparative Study of the Responses of Hasan Hanafi, Muhammad ‘Ābid al-Jābirī and Nurcholish Madjid*,”²⁵ disertasi ini memfokuskan kajian pada pandangan al-Jābirī dan beberapa cendiakiawan lain tentang slogan “kembali pada *al-Qur’ān* dan *as-Sunnah*”. Sangat berbeda dengan kajian penulis yang fokus pada konsep demokrasi menurut al-Jābirī dan Maudūdī.

Jadi, belum ada kajian yang sama yang memperbandingkan demokrasi dalam pandangan Muhammad ‘ābid al-Jābirī dan Abū al-A’la Maudūdī. Nyatalah skripsi yang penulis buat ini bukan repetisi apalagi plagiasi.

E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk sosial, namun selain makhluk sosial manusia juga adalah makhluk historis. Perkembangan seorang manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman serta lingkungan sekitar yang membentuknya. Oleh karena itu seseorang serta ekspresi-ekspresinya harus dipandang sesuai dengan konteks yang melatar belakangi kehidupannya. Masing-masing orang

²⁴ Suardi, “Jilbab dalam pandangan Abul A’la Maudūdī dan Muhammad Sa’id al-Asymawi,” Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

²⁵ Yudian Wahyudi Asmin, “*The Slogan “Back to the Qur’ān and the Sunna”: A Comparative Study of the Responses of Hasan Hanafi, Muhammad ‘Ābid al-Jābirī and Nurcholish Madjid*,”. Disertasi doktoral tidak diterbitkan (Kanada: Mc Gill University, 2002).

bergumul dalam antarrelasi dengan dunianya untuk menentukan nasib dan pada gilirannya proses dan hasil pergumulan itulah yang membentuk kepribadian serta pemikiran-pemikirannya. Rangkaian kegiatan dan peristiwa dalam kehidupan seseorang merupakan rantai yang tak terputus. Yang baru masih berlandaskan yang lama sedang yang lama mendapat arti dan relevansi baru pada perkembangan selanjutnya.²⁶ Manusia dengan pengalaman dan masa lalunya tak bisa dipisah apalagi dicerabut begitu saja. Oleh karena itu, ketika melakukan kajian terhadap pemikiran seseorang, maka perlu untuk diketahui latar belakang sosial, budaya, politik, ekonomi, serta berbagai konteks lain yang melingkupi kehidupannya, juga yang tak kalah penting adalah tokoh-tokoh yang mempengaruhinya.

Demokrasi bila dicoba mengkajinya dalam ranah pemikiran Islam maka ia termasuk dalam ruang lingkup agama (*dīn*) dan politik (*siyāsah*),²⁷ atau agama (*dīn*) dan negara (*daulah*).²⁸

Persoalan Islam dan demokrasi telah menjadi perdebatan panjang di antara berbagai kalangan yang hingga kini belum ada titik temu bahkan semakin jauh dari selesai. Nurcholis Madjid pernah mengibaratkan pembahasan tentang hubungan antara agama dan politik yang tak pernah habis

²⁶ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 47.

²⁷ Idris Thaha, *Demokrasi Reigius*, hlm. 6.

²⁸ Lihat Muḥammad ‘Ābid al-Jābirī, *ad-Dīn wa ad-Daulah wa Taṭbīq asy-Syarī’ah* (Beirut : Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1996). Edisi terjemahan bahasa Indonesia berjudul: *Agama, Negara dan Penerapan Syari’ah*, alih bahasa Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001).

ini seperti “menimba air Zam-zam di tanah suci”,²⁹ tidak akan pernah ada selesainya walaupun dibahas dan dikaji oleh para pemikir dari generasi ke generasi.

Dalam kajian hubungan antara Islam dan demokrasi (sering juga dirujuk kepada kajian hubungan agama dan politik), terdapat tiga model hubungan Islam dan demokrasi.³⁰ *Pertama*, mayoritas masyarakat Islam dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada pemisahan antara Islam dan demokrasi, demokrasi inheren atau bagian integral dari Islam, dan untuk itu demokrasi tidak perlu dijauhi dan malah menjadi bagian urusan Islam, Islam memiliki hubungan yang baik dengan demokrasi.³¹ Dari kelompok yang pertama ini ada yang lebih ekstrem yang menyatakan bahwa, menjauhkan diri dari dunia politik, yaitu demokrasi, berarti juga mengingkari diri dari sendi-sendi agama (Islam).³²

²⁹ Nurcholis Madjid menganalogikan pembahasan mengenai hubungan agama dan politik seperti menimba air Zam-zam di tanah suci. Setiap tahunnya air dari sumur tersebut selalu ditimba dan dibawa pulang oleh ribuan jama'ah haji dari seluruh dunia namun ia tak pernah kering. Lihat Nurcholish Madjid, “Islam dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan” dalam jurnal pemikiran Islam, *Paramadina*, Vol I, No.1, Juli-Desember 1998. Lihat juga Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm 7 dan 15.

³⁰ Idris Thaha, *Demokrasi Religius*. hlm 7-10. Model hubungan ini sebenarnya digunakan untuk melihat adanya hubungan agama dan negara (politik). Lihat juga dalam Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 240-302. Dan juga Ma'mun Murod al-Erebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, hlm. 4. Meskipun ketiga model hubungan ini dibuat dan disesuaikan dengan konteks keindonesiaan, namun menurut hemat penulis ketiga model tersebut juga cocok dan untuk diterapkan dalam konteks umat Islam secara keseluruhan (internasional).

³¹ Pandangan ini diwakili antara lain oleh, Deliar Noer, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Abdurrahman Wahid dan lain-lain.

³² Idris Thaha, *Demokrasi Religius*. hlm 8.

Hubungan Islam dan demokrasi yang semacam ini biasa disebut dengan hubungan *simbiosis mutualisme*. dalam pandangan ini Islam dianggap sebagai doktrin (Islam asli), yakni Islam sebagai teks al-Qur'an atau lebih umum sebagai "tradisi yang otoritatif".³³ Islam adalah agama sempurna dan menyeluruh yang meliputi *dīn* (agama), *dunya* (dunia), dan *daulah* (negara).³⁴

Kedua, sebagian masyarakat Islam menegaskan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Pandangan seperti ini antara lain diwakili Hizbut Tahrir, dan kelompok "fundamentalis" lain yang sejenis.³⁵ Demokrasi dipandang berlawanan dengan Islam, bahkan Islam dan demokrasi tidak memiliki hubungan sama sekali. Demokrasi berasal dari barat sedang barat jelas-jelas sekular. Islam mempunyai cara sendiri dalam pengambilan keputusan, yaitu *syūrā*. *Syūrā* sama sekali berbeda dengan demokrasi, sekalipun keduanya merupakan cara untuk mengambil keputusan.³⁶

Ketiga, kelompok yang bisa menerima adanya hubungan antara Islam dan demokrasi, tetapi dengan catatan tertentu. "Islam bisa menerima adanya

³³ pandangan yang dikemukakan Gudrun Kramer ini dikutip Idris Thaha dalam bukunya *Demokrasi Religius* dari "Teknik dan Nilai: Debat Muslim Kontemporer tentang Islam dan Demokrasi", dalam Ulil Abshar-Abdalla, *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 13.

³⁴ Pandangan yang dikemukakan Fazlur Rahman dan Nazim Ayub ini dikutip Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina , 1998), hlm. 7.

³⁵ Lihat Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm. 8.

³⁶ Lihat karya Taufiq Asy-Syāwī, *Fiqh asy-Syūrā wa al-Istisyārah*, (Mesir: Dār al-Wafā', 1992). buku ini telah diterjemah ke bahasa Indonesia dengan judul, *Syura bukan demokrasi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

hubungan dengan demokrasi, namun dengan beberapa catatan penting.³⁷ Kelompok ini tidak sepenuhnya menerima dan juga tidak sepenuhnya menolak. Alasannya, antara Islam dan demokrasi terdapat beberapa persamaan sekaligus juga ada perbedaan. Islam memiliki *high culture* yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bentuk *high culture* Islam itu antara lain; *Unitarianisme, Etika, Individualisme, Skripturalisme, Puritanisme, dan Egalitarianisme*.³⁸ Sedang perbedaannya adalah bahwa dalam Islam ada hak tuhan yang mesti dipenuhi dan itu tidak bisa dihilangkan meski melalui mekanisme yang demokratis sekalipun. Kelompok ini memiliki kecenderungan untuk mementingkan aspek substantif politik Islam.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan suatu metode yang jelas, begitu juga dengan penelitian ini. Berikut beberapa aspek metodologis yang penulis gunakan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang digali yang pada gilirannya dianalisis, bersumber dari buku-buku atau tulisan yang bertebaran di berbagai media, baik cetak

³⁷ Kelompok ini membedakan antara demokrasi yang berasal dari barat dengan Islam. Menurut mereka, dalam Islam terdapat nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Misalnya, *al-musawa, al-Syurā* dan lainnya. Sekalipun nilai dan prinsip-prinsip ini memiliki kesamaan dengan demokrasi ala barat namun pada penerapannya berbeda.

³⁸ Pandangan Samuel P. Huntington ini dikutip Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 125-126.

maupun elektronik. Adapun data tersebut tidak terbatas pada tulisan dua tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini (al-Jābirī dan Maudūdī), tetapi juga melibatkan tulisan-tulisan orang lain yang mempunyai kaitan dengan apa yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-komparatif-analitis.³⁹ Dengan metode deskriptif digambarkan bagaimana demokrasi dalam pandangan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī dan Abū al-‘A’lā Maudūdī. Setelah itu dilakukan analisis secara komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat. Setelah ditemukan persamaan dan perbedaan, dianalisis lagi untuk mengetahui relevansi pemikiran keduanya dalam konteks keindonesiaan. Langkah terakhir adalah mempertegas (menemukan) posisi masing-masing mereka dalam melihat relasi Islam dan demokrasi.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis dan pendekatan ilmu politik. Pendekatan historis bertujuan untuk mengetahui akar pemikiran kedua tokoh.⁴⁰ Sedang pendekatan ilmu politik bertujuan untuk menemukan relevansi pemikiran kedua tokoh dalam konteks keindonesiaan.

³⁹ Untuk lebih jelas tentang penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif-analitis lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 47-59. dan lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm 6.

⁴⁰ Pendekatan historis berfungsi untuk mengetahui latar belakang eksternal dan internal tokoh. Latar belakang eksternal meliputi kondisi khusus yang dialami oleh tokoh, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, sastra maupun filsafat. Latar belakang internal meliputi riwayat hidup, pendidikan, pengaruh yang diterima dan relasi tokoh dengan para ilmuwan sezaman. Lebih lanjut lihat Sudarto, *Metodologi*, hlm. 105.

4. Sumber Data

Data yang digali bersumber dari karya kedua tokoh yang merupakan buku utama (data primer), yaitu karya al-Jābirī yang berjudul *ad-Dīmuqrāṭiyyah wa Huqūq al-Insān*, dan buku Maudūdī yang berjudul *The Islamic Law and Constitution*.⁴¹

Sedang data penunjang (sekunder), berasal dari tulisan yang membahas pemikiran kedua tokoh serta tulisan lain (baik yang ditulis kedua tokoh atau bukan), yang mempunyai kaitan dengan pembahasan yang tengah dilakukan.

5. Metode Analisis

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif dan deduktif.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴¹ Sebagai data penunjang utama (sekunder), digunakan buku al-Jābirī yang telah diterjemah ke bahasa Indonesia dengan judul, *Syura: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, alih bahasa Mujiburrahman (Yogyakarta: LkiS, 2003). Dan buku Maudūdī *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat (Bandung: Mizan,)

⁴² Komparasi adalah langkah analisa dengan memperbandingkan objek-objek yang sedang dikaji sehingga didapat kejelasan mengenai masing-masing objek dan teranglah baik persamaan maupun perbedaannya. Sedang deduksi adalah langkah analisis yang berpijak dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus. lihat Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 44-45 dan 50-51. Lihat juga Sudarto, *Metode*, hlm. 42-43.

Bab dua membahas seputar demokrasi. Bab ini meliputi demokrasi secara umum, Islam dan demokrasi, perkembangan demokrasi di Maroko dan Pakistan.

Bab tiga berisi biografi singkat al-Jābirī dan Maudūdī serta pandangan mereka mengenai demokrasi.

Bab empat merupakan analisis. Pada bab ini dianalisis sejauh mana persamaan dan perbedaan pendapat al-Jābirī dan Maudūdī tentang demokrasi, juga dicari relevansi pemikiran keduanya dalam konteks keindonesiaan, lalu ditentukan posisi mereka dalam memandang relasi Islam dan demokrasi.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga disertakan saran-saran dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa titik temu antara al-Jābirī dan Maudūdī adalah sebagai berikut:

Al-Jābirī dan Maudūdī sependapat bahwa *syūrā* tidak lebih dari konsultasi yang tidak mengikat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman mereka atas praktek yang terjadi di masa Nabi dan para Sahabat (Khulafā' ar-Rāsyidūn), serta pemahaman atas beberapa ayat yang berbicara tentang *syūrā*.

Pemerintahan yang konstitusional, kedudukan yang setara bagi semua orang di depan hukum, serta adanya masa-masa pemilihan umum (demokrasi elektoral) merupakan isu yang sama-sama dianggap penting bahkan diperjuangkan oleh kedua tokoh.

Al-Jābirī melihat hal-hal di atas sebagai sesuatu yang mungkin (terbuka untuk difikirkan/*Ijtihādi*). Senada dengan al-Jābirī, Maudūdī menyatakan bahwa persoalan ini (konstitusi, persamaan dan pemilu) berada dalam lingkup *Ijtihādi*, boleh saja dilaksanakan walau tidak pernah dipraktekkan di masa Rasul maupun *Khulafā' ar-Rāsyidūn*.

Untuk membangkitkan umat Islam dari keterpurukannya, sangat perlu diadakan revolusi. Yaitu “revolusi kesadaran dan pemikiran” menurut al-Jabiri, atau “Revolusi kepemimpinan”/*Inqilāb al-imāmāt* menurut Maududi.

Berikut beberapa perbedaan terpenting antara al-Jābirī dan Maudūdī:

Menurut Maudūdī, kedaulatan hanyalah milik Allah semata. Bagi al-Jābirī, selain mengakui keesaan dan kedaulatan Allah, ia juga mengakui kedaulatan manusia. Konsekuensinya, Maudūdī menentang konsep kedaulatan rakyat, sedang al-Jābirī membelanya.

Maudūdī menganjurkan kaum muslimin untuk kembali kepada Islam dan menentang segala yang bersumber dari Barat, termasuk demokrasi. Bila diteliti lebih jauh, pernyataan Maududi yang seperti ini ternyata sarat dengan muatan dan ambisi politiknya, yaitu mengembalikan kekuasaan dan legitimasi *khilafah Islamiyah*. Dapat ditebak, Maududi merupakan keturunan Nabi sehingga memiliki *kans* lebih besar untuk memperoleh kekuasaan di banding ia harus menerima konsep demokrasi.

Lain pula al-Jābirī, ia mendekonstruksi pemikiran serta kebudayaan Arab menggunakan berbagai konsep dan metodologi yang bersumber dari Barat. Ia bahkan menganjurkan demokrasi bagi negeri Arab. Baginya demokrasi adalah obat bila bukan kesembuhan itu sendiri bagi keterpurukan bangsa Arab. Setelah dilakukan analisa historis, ternyata ideologi kepartaian (USFP) masih kental mempengaruhi pemikiran politik al-Jabiri.

Perbedaan mencolok lainnya antara al-Jabiri dan Maududi adalah pemahaman terhadap teks. Dalam memahami teks, al-Jābirī jauh lebih fleksibel (Liberal) di banding Maudūdī yang tergolong tekstual dan sederhana. Al-Jabiri lebih mengutamakan latar belakang seta tujuan-tujuan syari'at di banding Maududi yang cenderung *kesufi-sufian* dalam menafsirkan al-Qur'an.

Untuk konteks keindonesiaan, Pendapat al-Jābirī tentang perlunya “mengakarkan” demokrasi di tempat di mana ia hendak diterapkan, mendapatkan relevansinya di Indonesia. Demokrasi memang harus digali dan dilahirkan dari rahim bangsa Indonesia sendiri. Kritik Maudūī tentang rawannya demokrasi akan penyelewengan oleh berbagai kepentingan memang bersua praktiknya di Indonesia, Namun seperti yang dikatakan al-Jābirī; “tidak ada alternatif lain bagi kediktatoran dan tirani, selain demokrasi,” maka otomatis demokrasi tetap mendapatkan tempatnya di Indonesia.

Mengenai relasi Islam dan demokrasi, Maudūī termasuk mereka yang menentang demokrasi. Ia menganggap demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Islam telah mempunyai konsep sendiri mengenai segala sesuatu. Akan halnya al-Jābirī, ia termasuk mereka yang bisa menerima adanya hubungan antara Islam dan demokrasi dengan memberi catatan-catatan tertentu. Catatan tersebut adalah bahwa demokrasi bila hendak diterapkan maka ia harus disesuaikan dengan konteks dimana ia hendak diterapkan. Ia harus digali dari kesejarahan bangsa Arab bila hendak diterapkan di Arab. Janganlah demokrasi dijiplak begitu saja dari bangsa lain.

B. Saran dan Rekomendasi Di Penghujung Tulisan

Kelemahan yang umum terjadi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga adalah kegagalan ketika harus berhadapan dengan teks-teks asing. Kemampuan menerjemah atau setidaknya memahami teks-teks asing, terutama yang berbahasa Inggris dan Arab mutlak diperlukan jika membahas

pemikiran tokoh-tokoh yang berasal dari luar Indonesia. Kelemahan tersebut penulis rasakan sendiri ketika harus memahami karya-karya al-Jābirī dan Maudūdī yang kebanyakan berbahasa Arab dan Inggris. Untuk mengatasi persoalan ini, penulis “terpaksa” berulang kali harus membuka kamus dan bertanya *kian-kamari* serta membandingkannya dengan edisi terjemahan yang kadang (edisi terjemahan tersebut) tidak lebih jelas dari terjemahan penulis sendiri. Jadi hendaknya pemahaman dan kemampuan berbahasa asing di lingkungan UIN Sunan Kalijaga ditingkatkan, setidaknya hingga mencapai level “Pasif”. Sedang bagi mahasiswa secara individual, hendaknya sejak dini harus menyadari bahwa bahasa asing itu penting dan menguasainya juga penting.

Terlepas dari kendala-kendala teknis di atas, penulis menyadari kekurangan-kekurangan dari penelitian ini dan karena itu penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan kenapa umat Islam Indonesia tidak mengadopsi negara Islam versi Maudūdī (atau yang sejalan dengannya), tapi malah lebih mengedepankan negara yang demokratis (seperti yang juga dikedepankan al-Jābirī) merupakan hal yang patut diteliti lebih jauh. Bukankah hampir seluruh negara yang dihuni mayoritas muslim merupakan negara yang dikategorikan “tidak demokratis” oleh mata dunia. Indonesia sungguh beda dan merupakan contoh unik yang patut dipertimbangkan untuk diteliti. Memang ada yang menginginkan Indonesia menjadi “negara Islam”, tapi kegagalan selalu menyertai sepak terjang mereka.

2. Penelitian lebih jauh mengenai “transisi dan konsolidasi demokrasi” perlu dilakukan. Tentang peranan dan bentuk-bentuk lembaga negara serta pola hubungan antar berbagai lembaga negara, baik versi al-Jābirī maupun Maudūdī, tidak menutup kemungkinan untuk dibahas lebih mendalam.

Konsep tentang Syari’at Islam juga perlu diterjemahkan secara lebih arif dengan mengutamakan kemaslahatan. Jangan sampai terpaku pada teks dan doktrin kaku yang berujung pada pembelengguan akal manusia. Perlu dicermati tujuan dan latar belakang syari’ah yang sesungguhnya. Sudah adakah yang memperbandingkan konsep syari’ah menurut al-Jābirī dan Maudūdī? Sepengetahuan penulis belum dan penulis merekomendasikan hal tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Sebagai catatan di ujung seluruh rangkaian tulisan, usaha al-Jābirī untuk mengkonseptualisasikan demokrasi bagi negeri Arab, tanah air dan bangsanya sendiri, serta berbagai acuan dan garis-garis besar yang ditawarkannya sebagai pedoman untuk melangkah menuju demokrasi di negeri Arab, serta usaha Maudūdī untuk mewujudkan Islam sebagai “Way of Life” di dalam masyarakat, merupakan usaha intelektual yang patut diperhitungkan dan diambil manfaat. Walau bagaimanapun, demokrasi merupakan suatu hal yang masih terus diperdebatkan dan akan terus begitu entah sampai kapan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Hadis

Bukhari, al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Naisāburī, Al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujāj ibn Muslim al-Qusyairī an-, *al-Jāmi' u aṣ-Ṣaḥīḥ* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981)

Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abū Farīz, Muḥammad 'Abd al-Qadir, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa. Musthala Maufur, Jakarta: Rabbani Press, 2000.

Ahmad, Mumtaz, (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.

Asmin, Yudian Wahyudi, *Hermeunetika Versus Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

Asymawi, Muhammad Sa'id al-, *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa Luthfi Thomafi, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Azra, Azyumardi, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Baso, Ahmad, *Problem Islam dan Politik: Perspektif "Kritik Nalar Politik" M Abed Al-Jabiri*, edisi. ke-4, Jakarta: Tashwirul Afkar, 1999.

Jābirī, Muḥammad 'Ābid al., *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, alih bahasa Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

Jamīe, Muḥammad Aman bin Ali al-, *Syuro Murni Bukan Demokrasi*, alih bahasa Saiful Islam, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001.

Maudūdī, Abu al-A'la, *The Islamic Law and Constitution*, cet ke-6, Lahore: Islamic Publication Limited, 1977.

- _____, *Khilafah dan Kerajaan*, cet. ke-6, alih bahasa Muhammad Al-Baqir, Bandung: Mizan, 1996.
- _____, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1997.
- _____, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Rahman, Fazlur, "Prinsip-Prinsip Syūrā dan Peranan Umat Dalam Islam", dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, cet ke-5, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Syawi, Taufiq Asy-, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- _____, *Fiqh asy-Syūrā wa al-Istisyārah*, Mesir: Dār al-Wafā', 1992.

Politik

- Abdalla, Ulil Abshar, *Islam Dan Barat: Demokrasi Dalam Masyarakat Islam*, cet 1, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Akbar S. Ahmed, *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, alih bahasa Sirazi, Bandung: Mizan, 1993.
- Asymawi, Muhammad Sa'id al-, *Menentang Islam Politik*, alih bahasa Widyawati Bandung : Alifya, 2004.
- Diamond, Larry, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, alih bahasa Tim IRE Yogyakarta, Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Effendy, Bahtiar, *Islam Dan Negara : Transformasi Pemikiran Dan Praktik Poitik Islam Di Indonesia*, Jakarta : Paramadina , 1998.
- _____, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara Dan Demokrasi*, Yogyakarta : Galang Press 2001.
- El Fadl, Khaled Abou, *Islam dan Tantangan Demokrasi*, alih bahasa Gita Ayu Rahmani dan Ruslani, Yogyakarta: Ufuk Press, 2004.
- Esposito, Jhon L dan Jhon O Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, alih bahasa oleh Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.

- Faturohman, Deden dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: UMM Press, 2002.
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme Dan Demokrasi Liberal*, cet ke-2, Yogyakarta: Qalam, 2003.
- Hermawan, Eman, *Demokrasi untuk Pemula*, Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi Kedaulatan Rakyat, 2000.
- Jābirī, Muḥammad ‘Abid al-, *ad-Dīmuqrāṭiyyah wa huqūq al-Insān*, Beirut: Markaz al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1994.
- _____, *Syura: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, alih bahasa Mujiburrahman, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- _____, *al-‘Aql as-Siyāsī al-‘Arabī*, Beirut: Markaz al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1990.
- Maarif, Ahmad Syafi’i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, cet. ke-3, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Madjid, Nurcholish, “Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan” dalam jurnal pemikiran Islam, *Paramadina*, Vol I, No.1, Juli-Desember 1998.
- Ramage, Douglas E, *Percaturan Politik Di Indonesia: Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Revitch, Diane dan Abigail Thernstrom (ed.), *Demokrasi: Klasik dan Modern*, cet ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Schmandt, Henry J, *Filsafat Politik*, alih bahasa Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Thaha, Idris, *Demokrasi Reigius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Dan M. Amien Rais*, Yogyakarta: Teraju., 2005.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Tiro, Hasan Muhammad, *Demokrasi Untuk Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Teplok Press, 1999.
- Trenor, Paul, *Kebohongan Demokrasi*, alih bahasa Imron Rosyadi Yogyakarta: Wacana, 2001.

Yasin, Rahman, *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: AK. Group, 2006.

Lain-lain

Abduh, Muhammad, "Format Ideal Demokrasi Di dunia Arab (Tela'ah atas Pemikiran Politik Al-Jabiri)," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Abdullah, Amin, *Falsafah Kalam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Ahmad, Khurshid, dalam pengantar (editor) Abū al-A'lā al-Maudūdī, *The Islamic Law and Constitution*, cet. ke-6, Lahore: Islamic Publication Limited, 1977.

Alavi, Hamza, "Ethnicity, Muslim Society, and the Pakistan Ideologi", dalam Anita M. Weiss, Peny., *Islamic Reassertion in Pakistan*, Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 1986.

Anas, Muhammad, Kritik Ilmu Pengetahuan Jurgen Habermas dan Abed Al-Jabiri (Studi Komparasi Epistemologi), Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Ali, H. A. Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1993.

Aṣḥānī, Abī al-Qāsim Bin Muḥammad Ma'ārif Bin ar-Rahīb al-, *Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1991.

Asmin, Yudian Wahyudi "The Slogan "Back to the Qur'an and the Sunna" A Comparative Study of the Responses of Hasan Hanafi, Muhammad Abid al-Jabiri and Nurcholish Madjid. Montreal Kanada: Mc Gill University, 2002.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Badudu, J. S. dan Sultan Muhammad Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, cet ke-3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag RI, 1993.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dwyer, Kevin, *Arab Voices The Human Right Debate In The Middle East*, Berkeley Los Angles: University of California Press, 1991.

Eko, Sutoro, "Pelajaran Konsolidasi Demokrasi Untuk Indonesia." Dalam pengantar buku terjemahan Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Yogyakarta: IRE Press, 2003.

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002.

Findlay, Anne M., dkk., *Morocco: World Bibliographical Series: 47*, Oxford: Clio Press, 1984.

Ḥanafī, Ḥasān, dan M. 'Ābid al-Jābirī, *Ḥiwār al-Masyrīq Wa al-Magrīb: Taliḥi Silsilah Ar-Rudūd wa al-Munāqasāt*, Kairo: Maktabah Maḍbuli, 1990.

_____, *Membunuh Setan Dunia: Meleburkan Timur Dan Barat Dalam Cakrawala Dan Dialog*, alih bahasa Umar Bukhory, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Harmaneh, Walid, dalam pengantar Mohammed 'Abed al-Jabiri, *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam*, alih bahasa Moch Nur Ikhwan Yogyakarta: Islamika, 2003.

Isnaini, Siti Nurhayati, "Pemikiran Abul 'A'la Al-Maudūdī Tentang Teo Demokrasi: Studi Terhadap Relevansinya Dengan Pemikiran Kenegaraan Indonesia," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Jābirī, Muḥammad 'Ābid al-, *al-'Aql al-Akhlāqī al-'Arabi: Dirasah Taḥlīliyyah Naqdiyyah li Nuzm al-Qiyām fī aś-Ṣaqāfah al-'Arabiyyah*, Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-arabiyyah, 2001.

_____, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi: Dirasah Taḥlīliyyah Naqdiyyah Li Nuzm al-Ma'rīfah Fi aś-Ṣaqāfah al-Arabiyyah*, Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-arabiyyah, 1986.

_____, *Kritik Pemikiran Islam: Wacana Baru Filsafat Islam*, terj. Burhan, cet.I Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003.

- _____, *Nalar filsafat & Teologi Islam*, terj. Aksin Wijaya, Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- _____, *Fikr Ibn al-Khaldūn: al-'Aṣabiyyah wa ad-Daulah: Mu'alim Nazāriyah Khaldūniyah fī Tarīkh al-Islām*. ad-Dār al-Baydā'; Dār as-Ṣaqafah, 1971.
- _____, *Problem Peradaban: Penelusuran Jejak Kebudayaan Arab, Islam dan Timur*, Yogyakarta: Belukar, 2004.
- _____, *Post-Tradisionalisme Islam*, alih bahasa Ahmad Baso, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- _____, *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam*, alih bahasa Moch Nur Ikhwan, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- _____, *Formasi Nalar Arab*, alih bahasa Imam Khoiri, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Jurnal Pemikiran Islam Paramadina, Vol .I, No.1 Juli-Desember 1998.
- Lapidus, Ira. M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Maudūdī, Abu al-A'la al-, *Toward Understanding Islam*, Lahore: Islamic Publishing Limited, 1972.
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Munir, Muhammad, *From Jinnah to Zia*, Lahore: Vanguard Books, t.t
- Najib Kajlani, "Pemikiran Politik Islam Al-Jabiri," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Said, Edward W, *Kebudayaan Dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sheriden, Noel, *Marocco in pictures*, New York: Serling Publishing, 1972.
- Soleh, Ahmad Khudari, dkk., (ed)., *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Soros, George, *Krisis Kapitalisme Global*, alih bahasa Dindin Salahudin, cet. ke-3 Yogyakarta: Qalam, 2002.

Suardi, "Jilbab dalam pandangan Abul A'la al-Maudūdī dan Muhammad Sa'id al-Asymawi." Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Syafrin, Nirwan, "Kritik Terhadap "Kritik Akal Islam" Al-Jabiri," dalam *Jurnal Jurnal Islamia*, No.2, Tahun I, Juni-Agustus 2004.

The Shorter Oxford Dictionary, Vol. II, Oxford: Oxford University Press, 1956.

Tim Penulis IAIN, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. tt.

Zaelani.MN, Asep, "Demokrasi Dalam Islam: Studi Komparatif Antara M. Natsir dan Muhammad Abid Al-Jabiri," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Zayyin Alfi Jihad, "Intuisi menurut Muhammad Abed Al-Jabiri," Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Zortman, William, *Marocco: Problem of Newpower*, New York: Atheton Press, 1964.

Zulfikar, "Kritik Epistemologi Nalar Arab Menurut Abed Al-Jabiri," Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

<http://www.aljabriabed.com/IDENTITE.HTM>,

<http://www.aljabriabed.com./parcours.htm>,

<http://www.aljabriabed.com/LIVRES.HTM>,

<http://www.geocities.com/fgustami/almaudud.html>,

<http://www.geocities.com/fgustami/almaudud.html>,

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Abul_Ala_Maudūdī

TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnot	Terjemah
			BAB II
1	29	24	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
2	29	25	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
3	31	35	Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
			BAB III
4	69	53	Kamu semua lebih tahu tentang urusan duniamu (pen)

BAB IV			
5	92	6	Sesungguhnya bagi tubuhmu ada haknya, dan bagi matamu juga ada haknya, dan seterusnya (pen).



BIOGRAFI SARJANA DAN ULAMA

1. Deliar Noer

Lahir di Medan Sumatra Utara pada tahun 1926. Ia merupakan pakar ilmu politik dan meraih gelar Sarjana Muda pada Fakultas Ekonomi Politik Universitas Nasional Jakarta (1958). Gelar MA (1960) dan Ph.D (1963) di bidang ilmu politik dari Universitas Cornell, New York Amerika Serikat. Pernah menjadi dosen, Rektor dan guru besar di Universitas tersebut. Salah satu karya terpentingnya adalah *Pengantar ke Pemikiran Politik, Partisipasi dalam Pembangunan*.

2. Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzaly, lahir di Klaten pada tanggal 7 November 1925. Setelah menamatkan sekolah menengah pertamanya di *Mambaul Ulum* Solo, mengabdikan diri sebagai guru di Ungaran dan sebagai sukarelawan perang semasa revolusi fisik Indonesia. Pendidikan tinggi diselesaikan di *University of Exeter* Inggris (1953-1954) dan *Georgetown University* sampai mencapai gelar MA (1959). Karimnya sebagai diplomat diakhiri dengan diangkatnya ia menjadi Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) sampai Kabinet Pembangunan V (1988-1993). Pernah tercatat sebagai staf pengajar Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah yang mengampu kuliah *al-Fiqh as-Siyasiy*. Buku *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* karyanya banyak dibaca dan dirujuk oleh peminat pemikiran politik Islam.

3. Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal, lahir di India (kini bernama Republik Islam Pakistan) pada 1877. Ia merupakan tokoh modernis Islam dan penyair-filosof terkemuka sekaligus bapak pergerakan Pakistan bersama Ali Jinah. Puisi-puisinya yang indah dan sarat makna mampu membakar imajinasi kaum muslim untuk mendirikan sebuah negara sendiri bagi umat Islam India. Selain syair, di antara karya terpentingnya adalah *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* yang diterbitkan di Lahore pada 1962. Essai-essainya juga banyak bertebaran di berbagai media. Iqbal meninggal pada 1938, tak lama setelah bertemu al-Maududi di Lahore guna menggagas sebuah organisasi untuk mewujudkan masyarakat Islami di Pakistan.

4. Muhammad Ali Jinah

Muhammad Ali Jinah merupakan bapak pergerakan Pakistan bersama dengan Muhammad Iqbal. Ia lahir pada 1876 di India (yang kini menjadi Republik Islam Pakistan). Pada 1906 mendirikan Liga Muslim dan menggerakkan umat Islam India untuk meraih kemerdekaan dari Inggris. Pasca kemerdekaan, Ali Jinah mengusulkan teori dua bangsa yang memisahkan komunitas Muslim India dengan mayoritas Hindu. Negara yang diusulkan Ali Jinah adalah Republik Pakistan (yang memakai

sistem Nasionalisme Islam, namun sekuler). Ali Jinah meninggal pada 1948 di Pakistan, dan hingga sekarang ia tetap dianggap sebagai bapak pendiri Republik Pakistan.

5. Muhammad Amien Rais

Amien Rais lahir di Solo 26 April 1944. Memperoleh gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah di kampus yang kini bernama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1967. Selain sarjana muda, gelar Sarjana (Strata satu) juga ia peroleh dari Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1968. Amien Rais lalu melanjutkan studi ke Universitas Notre Dame, Amerika Serikat (1974) dan mendapat gelar M.A. Gelar Ph.D., ia peroleh dari Universitas Chicago, Amerika Serikat tahun 1981 di bidang Ilmu Politik. Ia sempat menjadi mahasiswa luar biasa di Universitas al-Azhar Mesir dari 1978-1979, sambil melakukan penelitian untuk disertasi. Sekarang Amien Rais adalah guru besar di UGM, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan menjadi dosen di beberapa Universitas lain. Ia Pernah menjabat Ketua Umum PP. Muhammadiyah, Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Pernah menjadi ketua Partai Amanat (PAN), dan pernah juga menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode presiden Abdurrahman Wahid Megawati. Beberapa karyanya antara lain; *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, juga *Beberapa Pandangan tentang Negara Islam*, dan sebagainya.

5. Muhammad Sa'id al-Asymawi

Lahir tahun 1932 di Mesir. Tamat dari fakultas hukum Universitas Kairo pada 1954. tahun 1978 melanjutkan studi ke *Harvard Law School*, Amerika Serikat. Pernah menjabat jaksa propinsi Alexandria, jaksa ketua propinsi Kairo Tengah. Tahun 1977 diangkat menjadi penasehat negara untuk pembuatan undang-undang. Tahun 1978 menjabat hakim Mahkamah Mesir lalu menjadi ketua. Setelah itu ia menjadi Ketua Mahkamah Pidana dan Mahkamah Keamanan Negara. Jabatan terakhir adalah anggota Kejaksaan Agung Mesir dan pensiun pada Juli 1993. Asymawi pernah mengisi kuliah di *American University* Kairo, *Harvard University*, *Princeton*, *Tempel*, *Marshall*, *Barkeley*, *Leiden*, *Sorbone* dan beberapa perguruan tinggi lain di Eropa. Di antara karyanya adalah *Ushul asy-Syari'ah* (1979), *Al-Islam as-Siyasi* (1987) dan masih banyak lagi.

6. Nurcholis Madjid

Lahir 17 Maret 1939 di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai tokoh pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Cak Nur (Panggilannya) menyelesaikan pendidikannya dengan meraih gelar ph.D dari University of Chichago dengan disertasi berjudul *Pimikiran Filsafat dan Kalam Ibnu Taimiyyah*. Pernah menjabat Rektor Universitas Paramadina Mulya Jakarta. Di antara karyanya *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (1988). Ia meninggal tahun 2006, dengan meninggalkan banyak pengaruh bagi generasi muda Islam Indonesia.

BIODATA PENULIS

Nama : Kifralwi Suparda
Tempat Tanggal Lahir : Bayur, 28 Oktober 1983
Alamat Asal : Koto Baru kenagarian Duo Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Alamat Di Yogyakarta : RT 27/RW 8 Sapen GK I/469A Yogyakarta
Email : mc_alwee@yahoo.com

Nama Orang Tua

Ayah : Karama, Datuak Bandaro Rajo
Ibu : Nurma

Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 33 Koto Baru 1989-1995
2. MTSP Koto Baru 1995-1998
3. MAN/MAKN Koto Baru Padang Panjang 1998-2001
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001-2007
5. Program Akta 4 UMY 2004

Karya yang di Publikasikan

- A. Resensi Buku "Kekerasan Komunal di Indonesia" (Media Indonesia, 2006)
- B. Puisi (Jurnal Kebudayaan Gurindam, edisi V, 2007)
- C. Puisi (Mail-list Mapokus@Yahoogroups.com)

Pengalaman Organisasi

1. Koordinator PTKM HMI Kom-Fak Syari'ah periode 2002-2003
2. Divisi Perpustakaan Kopma IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2002-2003
3. Sekretaris Asrama Mahasiswa Tanjung Raya Yogyakarta periode 2003-2004
4. Tim Redaksi Jurnal Kebudayaan Gurindam Yogyakarta 2006-2007
5. Koordinator Sanggar Talang Sarumpun Yogyakarta 2006-2007